

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Reformasi akuntansi pemerintah di Indonesia dalam pelaksanaannya akan berdampak pada reformasi anggaran yang meliputi proses penyusunan, pengesahan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban anggaran. Perubahan ini mempermudah proses penyusunan rencana-rencana kerja pemerintah daerah yang dituangkan dalam bentuk anggaran dan akan dijadikan pedoman dalam melaksanakan berbagai urusan pemerintahan, demi mencapai tujuan visi dan misi yang telah ditetapkan tiap-tiap pemerintahan daerah (Rasuli, 2015).

Sebagai pemerintah daerah, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dituntut agar memiliki kinerja yang berorientasi pada kepentingan masyarakat, dan mendorong aparat untuk senantiasa tanggap akan tuntutan lingkungannya, dengan berupaya memberikan pelayanan terbaik secara transparan dan berkualitas serta adanya pembagian tugas yang baik pada birokrasi tersebut (Dewi, 2015). Setiap organisasi baik sektor publik maupun swasta memerlukan sistem pengendalian manajemen yang menjamin tercapainya tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Dalam sistem pengendalian manajemen terdapat beberapa elemen yang penting, salah satu elemen penting tersebut adalah anggaran.

Anggaran merupakan pedoman tindakan yang akan dilaksanakan pemerintah meliputi rencana pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan yang diukur dalam satuan rupiah, yang disusun menurut klasifikasi tertentu secara sistematis untuk satu periode (PP 71 Tahun 2010 tentang Sistem Akuntansi

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Pemerintahan). Untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan pemerintah dibutuhkan penetapan anggaran. Penetapan anggaran ini melibatkan banyak pihak dan setiap unit kerja pemerintah. Hal ini dimaksudkan agar setiap unit bisa memberikan aspirasinya dalam menyusun anggaran sehingga tercipta pembangunan yang sesuai sasaran (Rasuli, 2015).

Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman menyampaikan Pemerintah Provinsi Riau yang di pimpinnya, menerapkan prinsip Keterbukaan dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Dijelaskan Gubri, pelaksanaan anggaran harus sesuai dengan kesepakatan dengan DPRD dan harus jelas peruntukannya. Kegiatan tahun 2017 di usulkan tahun 2016 (Riau.go.id).

Dengan munculnya kebijakan mengenai otonomi daerah yaitu UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, pemerintah daerah mendapat tantangan baru dalam menangani anggaran, salah satu prosedurnya adalah dengan metode partisipatif dengan melibatkan masing-masing OPD untuk mengajukan anggaran, mempersiapkan anggaran dan melaksanakan penyusunan anggaran (Rasuli, 2015). Partisipasi anggaran adalah proses yang menggambarkan keterlibatan individu-individu dalam penyusunan anggaran dan mempunyai pengaruh terhadap target anggaran dan perlunya penghargaan atas pencapaian target anggaran tersebut (Amelia, 2014). Adanya partisipasi dalam penyusunan anggaran sering dikatakan efektif, efisien, dan informasi yang dihasilkan lebih akurat (Putri, 2017).

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam pelaksanaan metode partisipatif, terdapat perilaku-perilaku oportunistik pada OPD dapat memicu terjadinya kesenjangan anggaran. Perilaku itu meliputi pengusulan kegiatan yang sesungguhnya bukanlah menjadi kegiatan prioritas, mengusulkan kegiatan yang berpeluang untuk mendapatkan kepentingan pribadi, mengalokasikan jumlah belanja yang terlalu besar untuk komponen belanja dan memperbesar anggaran untuk kegiatan yang sulit diukur (Permanasari, 2014).

Senjangan anggaran adalah selisih antara sumber daya yang sebenarnya diperlukan untuk secara efisien menyelesaikan suatu tugas dengan jumlah sumber daya yang lebih besar yang diperuntukkan bagi tugas tersebut. Dalam keadaan terjadinya *budgetary slack*, bawahan cenderung mengajukan anggaran dengan merendahkan pendapatan dan menaikkan biaya dibandingkan dengan estimasi terbaik yang diajukan, sehingga target akan mudah dicapai. *Budgetary slack* juga bisa terjadi karena adanya informasi yang bias dalam pelaksanaan partisipasi anggaran sehingga tujuan dibentuknya anggaran tersebut sulit dicapai (Arfan, 2010 dalam Rasuli, 2015).

Budgetary slack atau senjangan anggaran di Provinsi Riau cukup tinggi hal ini dapat dilihat dari besarnya dana SiLPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) pada tahun 2014 dengan jumlah APBD sesuai perubahan yakni Rp 8,84 triliun. Besarnya APBD tersebut juga membuat silpa semakin membengkak. Pada tahun 2009 silpa hanya berada pada kisaran Rp 1,88 miliar, kemudian meningkat ditahun 2011 mencapai Rp 1,3 triliun dan naik pada tahun 2012 yakni Rp 1,84 triliun dan terus membengkak ditahun 2014 dengan proyeksi silpa mencapai Rp 5

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

triliun. Itu berarti hanya sekitar 40 persen anggaran yang mampu diserap oleh pemprov Riau. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal. Pertama buruknya perencanaan anggaran karena diawal tidak membahas tentang kemampuan kapasitas penyerapan OPD. Akibatnya banyak OPD yang dalam pelaksanaannya tidak mampu melakukan penyerapan anggaran sesuai batas minimal selain itu pula adanya menganut sistem incremental yakni setiap tahun harus naik tidak peduli apakah mampu melakukan penyerapan atau tidak (www.kompasiana.com).

Berikut adalah data penyerapan anggaran Provinsi Riau dari tahun 2014-2016 :

Tabel I.1
Capaian Kinerja Output
Tahun 2014-2016

No	Penyerapan Dana	OPD		
		Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Pendapatan
1	2014			
	Anggaran (Rp)	24.154.148.000	18.834.337.021	69.518.443.287
	Realisasi (Rp)	23.552.641.000	16.111.115.140	50.109.817.077
	%	97,51	99,84	72,08
2	2015			
	Anggaran (Rp)	1.678.645.140.000	25.482.239.956	64.958.433.346
	Realisasi (Rp)	1.527.155.091.508	19.320.418.015	45.217.575.800
	%	90,97	75,82	69,61
3	2016			
	Anggaran (Rp)	1.575.998.817.000	54.085.705.210	60.615.740.073
	Realisasi (Rp)	1.451.893.360.000	45.770.055.246	51.682.653.653
	%	92,13	84,63	85,26

Sumber : Kumpulan LAKIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah), 2018

Berdasarkan tabel realisasi anggaran 3 tahun terakhir, realisasi anggaran tahun 2015 merupakan realisasi anggaran terendah dimana realisasi anggaran Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan sebesar 90,97%; realisasi

anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika sebesar 75,82%; dan realisasi anggaran Dinas Pendapatan hanya sebesar 69,61%.

Berikut adalah persentase SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana), Realisasi Penyerapan Anggaran Provinsi Riau 2017 :

Tabel I.2
Persentase SP2D, Realisasi Penyerapan Anggaran Provinsi Riau 2017

No	Nama OPD	Jumlah Belanja (Surplus / Defisit) (Rp)	% SP2D Penyerapan Anggaran
1	Badan Kepegawaian Daerah	46,297,566,330.57	76,64%
2	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	17,627,385,232.00	84,14%
3	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	38,755,469,669.86	40,2%
4	Badan Pendapatan Daerah	-2,816,434,503,169.00	69,91%
5	Badan Penelitian dan Pengembangan	19,901,769,101.40	88,1%
6	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	-427,024,183,159.00	77,82%
7	Badan Pengembangan SDM	13,195,444,930.82	123,83%
8	Badan Penghubung	23,789,418,775.22	80,82%
9	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	59,110,127,820.30	73,12%
10	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	31,204,715,000.00	104,77%
11	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	109,749,351,002.00	44,65%
12	Dinas Kebudayaan	76,164,391,664.05	47,6%
13	Dinas Kelautan dan Perikanan	65,011,718,544.00	53,85%
14	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	101,528,886,844.00	89,52%
15	Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	11,251,461,376.00	90,8%
16	Dinas Kesehatan	207,119,670,934.00	69,17%
17	Dinas Ketahanan Pangan	20,563,884,236.00	81,69%
18	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	47,103,947,653.00	53,86%
19	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	138,572,967,400.33	89,45%
20	Dinas Pariwisata	51,606,131,754.00	84,57%
21	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1,725,825,797,670.00	54,15%
22	Dinas Pemberdayaan Masyarakat	25,072,974,302.00	78,34%

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	dan Desa		
23	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	15,392,927,733.40	85,54%
24	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	30,887,320,318.03	67,59%
25	Dinas Pendidikan	2,378,069,481,532.00	67,41%
26	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	28,179,112,082.00	97,69%
27	Dinas Perhubungan	46,635,262,892.00	58,27%
28	Dinas Perindustrian	44,905,553,370.00	53,05%
29	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	27,836,418,664.00	80,7%
30	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	373,112,586,400.00	54,75%
31	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	88,559,827,884.00	41,06%
32	Dinas Sosial	60,212,093,900.00	67,43%
33	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	140,819,540,277.00	75,27%
34	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	62,653,954,503.20	79,93%
35	Inspektorat	34,342,819,712.00	83,33%
36	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	6,357,708,000.00	73,36%
37	PPKD	-2,030,439,619,257.93	71,77%
38	Rumah Sakit Jiwa Tampan	98,493,717,672.00	61,81%
39	RSUD Arifin Achmad	457,454,785,022.05	59,8%
40	RSUD Petala Bumi	80,233,472,388.25	49,14%
41	Satuan Polisi Pamong Praja	47,493,417,415.45	83,76%
42	Sekretariat Daerah	246,996,735,522.00	72,23%
43	Sekretariat DPRD	324,940,935,357.00	95,56%

 Sumber : <https://Jaga.riau.go.id> (per 16 Desember 2017)

Tabel di atas menunjukkan bahwa kinerja OPD masih belum optimal, terbukti dalam persentase SP2D, realisasi penyerapan anggaran per Desember 2017 belum terserap dengan baik. Periode tahun 2017 akan berakhir dalam waktu dekat namun di beberapa OPD masih ada persentase realisasi penyerapannya dibawah 50% dan artinya anggaran belanja tidak diserap secara maksimal. Hal ini menunjukkan bahwa belum seluruhnya realisasi penyerapan anggaran dapat terserap yang mengakibatkan kemungkinan adanya sisa lebih anggaran pada tahun ini. Terdapat di beberapa OPD jumlah belanjanya mengalami defisit yaitu selisih

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

kurang antara pendapatan daerah dan belanja daerah seperti di BPD, BPKAD, dan PPKD.

Berdasarkan tabel diatas mencerminkan adanya *budgetary slack*, karena anggaran yang direalisasikan terbukti lebih rendah. Hal ini mungkin disebabkan oleh faktor ketidakpastian lingkungan yang memoderasi (memperkuat atau memperlemah) terjadinya kesenjangan anggaran (Perdana, 2015). Walaupun anggaran pemerintah mengalami surplus tetapi pengestimasiannya cenderung terjadi *slack* (senjangan). Suartana (2010) menyatakan senjangan anggaran terjadi karena penentuan pendapatan yang terlalu rendah dan biaya yang terlalu tinggi.

Hingga Selasa (17/10) serapan APBD Riau 2017 baru mencapai untuk fisik 69 persen dan keuangan 47,5 persen. Tersisa dua bulan penuh lagi mengejar target realisasi APBD 90 persen. Dari hasil rekap serapan di OPD, sejauh ini masih terlihat bervariasi ada yang sudah melampaui target dan ada juga masih dibawah target. Tergantung kegiatan di masing-masing OPD nya (Pekanbaru.Tribunnews.com)

Peneliti-peneliti akuntansi terdahulu telah meneliti pengaruh partisipasi penyusunan anggaran terhadap senjangan anggaran dan menunjukkan hasil yang tidak konsisten. Penelitian yang dilakukan oleh Dunk (1993), Supanto (2010) dan Sinaga (2013) menunjukkan bahwa partisipasi anggaran berpengaruh negatif terhadap senjangan anggaran. Sebaliknya, hasil penelitian Young (1985), Falikhatun (2007), Kartika (2010), Nopiany secara Simultan (2012) Fatmawati (2013), Marito (2015), Nurhidayati (2015), Saputra secara Simultan (2016)

menunjukkan bahwa partisipasi anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap senjangan anggaran.

Selain partisipasi penyusunan anggaran, terdapat pula faktor lain yang menyebabkan terjadinya senjangan anggaran, salah satunya adalah komitmen organisasi. Komitmen organisasional ditunjukkan dalam sikap penerimaan, keyakinan yang kuat terhadap nilai-nilai dan tujuan sebuah organisasi serta adanya dorongan yang kuat untuk mempertahankan keanggotaan dalam organisasi demi tercapai tujuan organisasi (Robbin, 2008). Komitmen organisasi dapat terwujud apabila individu dalam organisasi menjalankan hak dan kewajiban mereka sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing dalam organisasi, karena pencapaian tujuan organisasi merupakan hasil kerja semua anggota organisasi yang bersifat kolektif (Mongeri, 2013).

Peneliti-peneliti akuntansi terdahulu telah meneliti pengaruh komitmen organisasi terhadap senjangan anggaran dan menunjukkan hasil yang tidak konsisten pula. Penelitian yang dilakukan oleh Kusumawati (2006), Permanasari, Zulbahridar dan Al Azhar (2014), Nopriyanti (2016) menunjukkan komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap senjangan anggaran. Sebaliknya, penelitian Nitiari dan Yadnyana (2015) yang dilakukan menunjukkan komitmen organisasi berpengaruh negatif pada senjangan anggaran.

Ketidakkonsistenan penelitian-penelitian tentang partisipasi penyusunan anggaran dan komitmen organisasi terhadap senjangan anggaran yang melatarbelakangi penelitian ini untuk terus dilanjutkan dan memungkinkan dilakukan pendekatan kontijensi (*contingency theory*) dengan cara memasukan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

variabel lain yang mungkin mempengaruhi. Oleh karena itu penelitian ini menguji kembali hubungan antara partisipasi penyusunan anggaran dan komitmen organisasi dengan senjangan anggaran, juga didekati dengan faktor kontijensi dengan memasukkan variabel moderasi dalam menguji hubungan tersebut yaitu variabel motivasi dan ketidakpastian lingkungan.

Motivasi menurut Robbins (2008) adalah proses manajemen untuk mempengaruhi tingkah laku manusia berdasarkan pengetahuan apa yang membuat orang bergerak. Salah satu fungsi anggaran adalah sebagai alat untuk memotivasi para pelaksana dalam melaksanakan tugas-tugas atau mencapai tujuan organisasi. Dan dalam konteks partisipasi penyusunan anggaran sebagai suatu mekanisme dalam pertukaran informasi, dapat memungkinkan karyawan dan pimpinan untuk memperoleh pengertian yang lebih jelas tentang pekerjaan mereka. Sehingga hal itu akan sangat membantu para karyawan dan pimpinan yang memiliki motivasi tinggi untuk memperbaiki kinerja, sebaliknya karyawan dan pimpinan yang memiliki motivasi yang kurang tidak akan memperbaiki kinerja mereka.

Ketidakpastian merupakan persepsi dari anggota organisasi. Seseorang mengalami ketidakpastian karena dia merasa tidak memiliki informasi yang cukup untuk memprediksi masa depan secara akurat (Kartika, 2010 dalam Oktafiana, 2015). Ketidakpastian lingkungan yang rendah mendorong terjadinya senjangan anggaran karena keterbatasan pimpinan dalam menganalisis seluruh informasi. Pimpinan perlu bantuan bawahan untuk memproses informasi agar menghasilkan analisis yang akurat. Kondisi ini dapat dimanfaatkan bawahan untuk melakukan

tindakan negatif demi kepentingan pribadinya dengan memberikan informasi biasa kepada atasan (Sujana, 2009 dalam Putri, 2017).

Objek pada penelitian ini adalah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Provinsi Riau. Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang dilakukan oleh M. Rasuli (2015) tentang “Pengaruh Partisipasi Anggaran Terhadap Senjangan Anggaran Dengan Ketidakpastian Lingkungan Dan Motivasi Sebagai Variabel Moderasi” dengan menambahkan Komitmen Organisasi sebagai variabel bebas. Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis melakukan suatu penelitian dengan judul **“PENGARUH PARTISIPASI PENYUSUNAN ANGGARAN DAN KOMITMEN ORGANISASI TERHADAP SENJANGAN ANGGARAN DENGAN MOTIVASI DAN KETIDAKPASTIAN LINGKUNGAN SEBAGAI VARIABEL MODERATING (Studi Empiris Pada Pemerintah Provinsi Riau)”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan dari permasalahan dalam penelitian ini, yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah terdapat pengaruh partisipasi penyusunan anggaran terhadap senjangan anggaran pada pemerintah Provinsi Riau?
2. Apakah terdapat pengaruh komitmen organisasi terhadap senjangan anggaran pada pemerintah Provinsi Riau?
3. Apakah motivasi memoderasi hubungan partisipasi penyusunan anggaran terhadap senjangan anggaran pada pemerintah Provinsi Riau?

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Apakah ketidakpastian lingkungan memoderasi hubungan partisipasi penyusunan anggaran terhadap senjangan anggaran pada pemerintah Provinsi Riau?
5. Apakah motivasi memoderasi hubungan komitmen organisasi terhadap senjangan anggaran pada pemerintah Provinsi Riau?
6. Apakah ketidakpastian lingkungan memoderasi hubungan komitmen organisasi terhadap senjangan anggaran pada pemerintah Provinsi Riau?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian ini adalah untuk memperoleh bukti empiris mengenai :

1. Pengaruh partisipasi penyusunan anggaran terhadap senjangan anggaran pada pemerintah Provinsi Riau
2. Pengaruh komitmen organisasi terhadap senjangan anggaran pada pemerintah Provinsi Riau
3. Pengaruh motivasi terhadap hubungan partisipasi penyusunan anggaran terhadap senjangan anggaran pada pemerintah Provinsi Riau
4. Pengaruh ketidakpastian lingkungan terhadap hubungan partisipasi penyusunan anggaran terhadap senjangan anggaran pada pemerintah Provinsi Riau
5. Pengaruh motivasi terhadap hubungan komitmen organisasi terhadap senjangan anggaran pada pemerintah Provinsi Riau
6. Pengaruh ketidakpastian lingkungan terhadap hubungan komitmen organisasi terhadap senjangan anggaran pada pemerintah Provinsi Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1.4 Manfaat Penelitian

Dari berbagai hal yang telah diungkapkan di atas, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Secara teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pelengkap referensi mengenai pengaruh partisipasi penyusunan anggaran terhadap senjangan anggaran dan kinerja aparatur pemerintah daerah dengan motivasi sebagai variabel moderating.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan penganggaran.
2. Secara Praktis
 - a. Bagi Peneliti

Sebagai wahana untuk latihan dan studi banding antara teori yang diperoleh dalam perkuliahan dengan praktek yang sebenarnya diterapkan, sehingga dapat dijadikan bekal untuk memasuki dunia kerja. Selain itu, penelitian ini dapat menambah pengetahuan peneliti terutama mengenai “Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran Terhadap Senjangan Anggaran dan Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah Dengan Motivasi Sebagai Variabel Moderating”
 - b. Bagi Universitas

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi dunia pendidikan, khususnya Perguruan Tinggi. Selain itu, penelitian ini

diharapkan dapat memberikan masukan dan menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya.

1.5 Sistematika Penulisan

Pembahasan dalam skripsi ini akan disajikan dalam lima bab yang berurutan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika penulisan. Bab ini bertujuan untuk memberikan gambaran umum mengenai isi penulisan secara menyeluruh.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini membahas tentang landasan teori yang digunakan untuk membantu memecahkan masalah penelitian, landasan teori ini diperoleh dari berbagai studi literatur yang berkaitan dengan topik. Sub bab dalam landasan teori ini menjelaskan tentang teori-teori, partisipasi penyusunan anggaran, komitmen organisasi, senjangan anggaran, motivasi, ketidakpastian lingkungan, penelitian terdahulu, kerangka penelitian, dan hipotesis.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini menjelaskan mengenai pendekatan dan metode penelitian yang digunakan, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, definisi dan pengukuran variabel, dan metode analisis data.

BAB IV HASIL DAN ANALISIS

Pada bab ini berisi tentang uraian deskripsi objek penelitian, analisis data, dan interpretasi hasil penelitian.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini menguraikan tentang simpulan, keterbatasan penelitian yang dilakukan serta memberikan implikasi penelitian dan saran untuk penelitian yang akan datang.